

BAB II LANDASAN

TEORI

A. Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik.²²

Sekolah Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional, sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.²³

Menurut Sudjana dalam buku Engkoswara dan Komariah mengemukakan manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan yang lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.²⁴

Selanjutnya Engkoswara dan Komariah memandang manajemen dari tiga definisi yaitu manajemen sebagai disiplin ilmu, manajemen sebagai kumpulan orang-orang yang berkemampuan mengelola dan manajer sebagai

²² Soebagio Admodiwiro, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Ardadizya, 2000), hlm. 37

²³ Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

²⁴ Engkoswara, dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung. Alfabeta, 2010), hlm. 86

karier yang menawarkan peluang karier. Sebagai disiplin ilmu manajemen merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki body of knowledge yang dapat dipelajari dan berguna bagi pengembangan ilmu dan pemecahan masalah usaha. Sebagaimana kumpulan orang menunjukkan bahwa manajemen tidak dapat dilakukan sendiri tetapi sebagai usaha kolektif yang mendayagunakan dan menyatukan orang-orang. Sebagai peluang karier manajemen menjajikan prosperity bagi pelaku usaha yang kompeten karena menjadi suatu pekerjaan yang progresif dan berstrata mulai lower manager sampai top manager.²⁵

Terry membagi fungsi-fungsi fundamental manajemen itu atas lima fungsi fundamental yaitu:

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (pengorganisasian)
3. *Actuating* (pelaksanaan)
4. *Controlling* (pengawasan)
5. *Motivating* (motivasi).²⁶

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pra-syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa. Salah satu wahana untuk meningkatkan ualitas SDM tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu

²⁵ Engkoswara, dan Komariah, *Op.Cit.* 87

²⁶ George W. Terry and Leslie W. Rue, *Op.Cit.*, 15.

pengetahuan dan teknologo (iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (imtak).²⁷

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi dunia global.²⁸

Pendidikan berkembang dari yang sederhana (primitif), yang berlangsung dalam zaman di mana manusia masih berada dalam ruang lingkup kehidupan yang serba sederhana. Tujuan-tujuannya sangat terbatas pada hal-hal yang bersifat survival (pertahanan hidup terhadap ancaman alam sekitar). Pendidikan itu adalah ketrampilan membuat alat-alat untuk mencari dan memproduksi bahan-bahan kebutuhan hidup, beserta pemeliharannya. Kemudian diciptakan pula alat-alat untuk mengolah hasil-hasil yang diperoleh menjadi bahan yang sesuai dengan kebutuhan.²⁹

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

²⁷ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 3-4

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Imron Arifin, *Adult Learning, third edition*. (Milton Keynes Philadelphia, 1989), hlm. 2

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁰

Secara umum, pendidikan sesungguhnya dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara luas-tidak terbatas dan secara sempit-terbatas. Pengertian pendidikan secara luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup yang memengaruhi pertumbuhan individu.³¹

Pengertian pendidikan secara sempit atau sederhana adalah persekolahan. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial.³²

Pendidikan dalam arti sederhana juga diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.³³ Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogie berarti pendidikan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dewasa dimaksud adalah dapat

³⁰ Tim Penyusun, *Undang-Undang Sisdiknas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

³¹ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 3

³² *Ibid*, 6

³³ Hasbullah, *Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2005),

bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis, psikologis, pedagogies, dan sosiologis. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.³⁴

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan, menurut Driyarkara, pendidikan adalah pematangan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insan.³⁵

Sedangkan manajemen pendidikan sendiri menurut Mulyasa dijelaskan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.³⁶

Dalam kegiatan belajar mengajar sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran proses kegiatannya, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh setiap instansi terutama sekolah. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang berupa barang, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan

³⁴ A.M. Sudirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 4

³⁵ Driyarkara, *Perkembangan Kognitif*. (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980), hlm. 78

³⁶ Mulyasa, *Op.Cit.*, 19.

proses belajar-mengajar. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal, oleh karena itu pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif.³⁷

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. Dalam pengelolaan pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana terutama kepala sekolah yang langsung menangani sarana dan prasarana tersebut. Dan pihak sekolah harus dapat memelihara dan memperhatikan sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada. Maka dengan adanya sarana dan prasarana di sekolah siswa dapat belajar secara maksimal dan efisien.³⁸

Jadi pengelolaan terhadap sarana dan prasarana harus lebih ditekankan lagi dalam lembaga pendidikan seperti sekolah dan harus ada yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kepala sekolah dapat merencanakan dan mendata apa saja sarana dan prasarana yang harus digunakan di sekolah tersebut. Jika semua langkah-langkah pengelolaan telah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan maka akan berdampak positif terhadap siswa-siswa dalam proses belajar mengajar dan tercapainya tujuan

³⁷ Rika Megasari, *Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMP N 5 BukitTinggi*. (Bahana Manajemen Pendidikan, 2014), hlm. 1

³⁸ *Ibid*, 2

pendidikan secara efektif dan efisien. Maka penyelenggara pendidikan baik itu pemerintah, kepala sekolah, guru, personil sekolah yang lainnya maupun masyarakat perlu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman.³⁹

Dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 juga disebutkan pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:

- a. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Belajar untuk memahami dan menghayati
- c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif
- d. Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain
- e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.⁴⁰

Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.⁴¹

Departemen Pendidikan Nasional telah membedakan antara sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dipindah– pindah di sekolah. Berkaitan dengan ini, sarana pendidikan

³⁹ Megasari, *Op.Cit.*, 3

⁴⁰ Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah

⁴¹ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm.

adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Penekanan pada pengertian tersebut ialah pada sifatnya, sarana bersifat langsung, dan prasarana tidak bersifat langsung dan menunjang proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.⁴²

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan sangat mendukung untuk suksesnya proses belajar mengajar di sekolah.⁴³

Pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki beberapa prinsip secara umum yaitu:

1. Pencapaian tujuan
2. Efisiensi
3. Administratif
4. Kejelasan tanggung Jawab
5. Kekohesian.⁴⁴

Menurut Bafadal, dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan,

⁴² Permendiknas, *Op.Cit.*, 37

⁴³ Prihatin, *Op.Cit.*, 62

⁴⁴ *Ibid.*

terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didaya gunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah.
2. Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diakdakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan.
3. Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan UU, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasika kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah.
5. Prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak.⁴⁵

Sedangkan prinsip manajemen sarana dan prasarana secara khusus

⁴⁵ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, (Jakarta: Bumi aksara, 2000), hlm. 56

adalah:

1. *Site* (lahan bangunan)
2. *Building* (Bangunan)
3. *Equipment* (Perlengkapan)⁴⁶

Prihatin menjelaskan bahwa tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan di sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah sebagai berikut:⁴⁷

1. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dengan dana yang efisien.
2. Mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
3. Mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah.⁴⁸

Jadi, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan professional (yang berkaitan dengan sarana dan prasarana) terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

⁴⁶ Prihatin, *Loc.Cit.*

⁴⁷ Prihatin, *Loc.Cit.*

⁴⁸ Prihatin, *Op.Cit.*, 57-58

B. Proses Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Secara umum proses kegiatan manajemen sarana prasarana pendidikan, meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, dan pengawasan dan pemeliharaan, serta penghapusan.⁴⁹

Proses-proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaan.

1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan

Perencanaan merupakan seperangkat keputusan yang diambil dalam menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana merupakan rangkaian dari berbagai keputusan yang diambil dengan isi mengenai kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana. Berkaitan dengan perencanaan ini, Jones dalam Sulistyorini menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan sekolah.⁵⁰

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk

⁴⁹ Barnawi dan Arifin, *Manajemen Sarana & Prasarana Sekola*, (Jogjakarta: AR RUZZ MEDIA, 2016), hlm. 35

⁵⁰ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 120

kelancaran dalam proses pendidikan disekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada beberapa cara yang ditempuh untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah. Sedangkan menurut Bafadal sistem pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, dapat dilakukan berbagai cara antara lain:

- a. Dropping dari pemerintah hal ini meruoakan bantuan yang diberikan permerintah kepada sekolah. Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah tetapharus mengusahakan dengan cara lain.
- b. Mengadakan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu.
- c. Meminta sumbangan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga- lembaga sosial yang tidak mengikat.
- d. Mengadakan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ketempat lain.
- e. Mengadakan perlengkapan sekolah dengan cara tukar menukar barang yang dimiiki denga barang lainnya yang dibutuhkan sekolah.⁵¹

Memilih sarana dan prasarana pendidikan bukanlah berupa resep yang lengkap dengan petunjuk-petunjuknya, lalu pendidik menerima resep itu begitu saja, sarana pembelajaran hendaknya direncanakan, dipilih dan diadakan dengan teliti sesuai dengan kebutuhan sehingga

⁵¹ Bafadal, *Op.Cit.*, 31.

penggunaan berjalan dengan wajar. Untuk itu pendidik hendaknya menyesuaikan dengan sarana pembelajaran dengan faktor-faktor yang dihadapi, yaitu tujuan apakah yang hendak dicapai media apa yang tersedia, pendidik mana yang akan menggunakannya dan peserta pendidik mana yang dihadapi. Faktor lain yang hendaknya dipertimbangkan dalam penelitian sarana pembelajaran adalah kesesuaian dengan ruang dan waktu.⁵²

3. Pendistribusian

Barang-barang perlengkapan sekolah (sarana dan prasarana) yang telah diadakan dapat didistribusikan. Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggungjawab dari seorang penanggungjawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam rangka itu, ada tiga langkah yang sebaiknya ditempuh oleh bagian penanggungjawab penyimpanan atau penyaluran, yaitu: (1) penyusunan alokasi barang; (2) pengiriman barang; (3) penyerahan barang.⁵³

4. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan

Inventarisasi merupakan aktifitas dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistimatis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI

⁵² Bafadal, *Op.Cit.*, 31.

⁵³ *Ibid*, 32

Nomor Kep.225/MK/V/4/1971 bahwa barang milik negara berupa semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber baik secara keseluruhan atau bagian sebagainya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) ataupun dana lainnya yang barang-barang di bawah penguasaan kantor Departemen dan Kebudayaan, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Kegiatan inventarisasi atau pencatatan sarana dan prasarana ini merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan, dapat diketahui jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merk, ukuran harga dan sebagainya. Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.⁵⁴

Menurut Bafadal kegiatan inventarisasi, meliputi:

- a. Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam buku penerimaan barang, buku bukan inventaris, buku (kartu) stok barang.
- b. Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang terolong barang Inventaris, caranya dengan membuat kode barang dan menempelkannya dan menuliskannya.
- c. Semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang inventaris harus dilaporkan.⁵⁵

Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini disediakan instrumen administrasi berupa: buku inventaris, buku pembelian, buku

⁵⁴ Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.225/MK/V/4/1971

⁵⁵ Bafadal, *Op.Cit.*, 33

penhapusan, dan kartu barang.

5. Penggunaan sarana dan prasarana

Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektifitas dan efisiensi. Prinsip efektifitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara prinsip efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis rusak atau hilang.⁵⁶

Penggunaan sarana dan prasarana di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Namun, kepala sekolah dapat melimpahkan pekerjaannya kepada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah yang menangani sarana dan prasarana sering disebut sebagai Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana. Apabila kondisi sekolah tidak memungkinkan untuk mengangkat wakil kepala sekolah sebaiknya kepala sekolah menunjuk petugas tertentu yang dapat menangani masalah tersebut Menurut Bafadal.⁵⁷

Kepala sekolah harus dapat menjamin sarana dan prasarana telah digunakan secara optimal oleh warga sekolah. Akan tetapi, perlu

⁵⁶ Bafadal, *Op.Cit.*, 34)

⁵⁷ *Ibid*, 33

dihindari kemungkinan terjadi kesemrawutan dalam penggunaannya. Menurut Herawan dan Nasihin hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana:

- a. Penyusunan jadwal penggunaan harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya.
- b. Hendaknya kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas pertama.
- c. Waktu/jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran.
- d. Penugasan/penunjukan personel sesuai dengan keahlian pada bidangnya, misalnya petugas laboratorium, perpustakaan, operator komputer dan sebagainya.
- e. Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah, antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler harus jelas.⁵⁸

Selain itu, perlu juga dihindari kemungkinan terjadi kerusakan dini pada sarana dan prasarana. Untuk mengatasi masalah ini, pengguna sarana dan prasarana hendaknya ikut bertanggungjawab dalam pemeliharaannya. Jika pada suatu alat terdapat suatu prosedur pemakaiannya, setiap pengguna wajib mengikuti prosedur pemakaian tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Endang Herawan dan Sukarti Nasihin, *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Pengantar Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI, 2001), hlm. 123

⁵⁹ *Ibid.*

6. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah

Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah serta agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai.⁶⁰

Ditinjau dari sifat maupun waktunya, ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, antara lain:

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada empat macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Keempat macam pemeliharaan tersebut cocok untuk perawatan mesin.
 - 1) Pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan.
 - 2) Pemeliharaan yang bersifat pencegahan.
 - 3) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan.
 - 4) Perbaikan berat.
- b. Ditinjau dari waktu pemeliharanya, ada dua macam pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - 1) Pemeliharaan sehari-hari, seperti menyapu, mengepel lantai, membersihkan pintu.
 - 2) Pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting, pengapuran tembok.⁶¹

⁶⁰ Barnawi dan Arifin, *Op.Cit.*, 34.

⁶¹ *Ibid*,

Sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan berkala.

a. Pemeliharaan sehari-hari:

- 1) Pemakaian aliran harus diperhatikan. Pada siang hari dalam ruang yang cukup terang lampu dipadamkan. Demikian pula pada malam hari lampu pada ruang-ruang yang tidak memerlukan penerangan lampu dimatikan.
- 2) Panel/kotak sekring diperiksa.
- 3) Bola-bola lampu diperiksa. Apabila ada yang putus segera diganti.⁶²

b. Pemeliharaan berkala:

- 1) Sekurang-kurangnya sebulan sekali instalasi harus dikontrol terutama pada meteran pemakaian apakah ada kelainan pada meteran.
- 2) Instalasi jaringan kabel agar dikontrol dan apabila ada kerusakan yang tidak dapat diatasi sendiri oleh petugas segera dilaporkan kepada PLN setempat.⁶³

7. Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan

Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana

⁶² Barnawi dan Arifin, *Op.Cit.*, 34.

⁶³ *Ibid*, 35

dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.⁶⁴

Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh karena muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan. Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi.
- b. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.
- c. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.
- d. Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.⁶⁵

Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan meniadakan atau menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pada Peraturan

⁶⁴ Barnawi dan Arifin, *Loc.Cit.*

⁶⁵ Depdiknas, *Op.Cit.*, 52-53.

Perundang-Undangan yang berlaku. Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk dapat menyingkirkan atau menghapus sarana dan prasarana. Beberapa alasan tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk menghapus sesuatu sarana dan prasarana harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat di bawah ini.⁶⁶

- 1) Dalam keadaan rusak berat yang sudah dipastikan tidak dapat diperbaiki lagi atau dipergunakan lagi.
- 2) Perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sekali sehingga merupakan pemborosan uang Negara.
- 3) Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan
- 4) Penusutan diluar kekuasaan pengurus barang
- 5) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini
- 6) Barang-barang yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi.
- 7) Ada penurunan efektivitas kerja
- 8) Dicuri, diselewengkan, musnah akibat bencana alam dan lain sebagainya.⁶⁷

Secara Umum penghapusan barang dapat dilakukan dengan cara lelang dan pemusnahan. Namun, dalam penghapusan harus melewati tahap-tahap tertentu.

Penghapusan barang dapat melalui tahap-tahap berikut ini.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), hlm. 281-282

⁶⁷ *Ibid.*

- a) Pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan.
- b) Memperhitungkan faktor-faktor penyingkiran dan penghapusan ditinjau dari segi nilai uang.
- c) Membuat perencanaan.
- d) Membuat surat pemberitahuan kepada yang akan diadakan penyingkiran dengan menyebutkan barang-barang yang akan disingkirkan.
- e) Melaksanakan penyingkiran dengan cara mengadakan lelang, mengibahkan kepada badan/orang lain, membakar, penyingkiran dilakukan oleh atasan.
- f) Membuat berita acara tentang pelaksanaan penyingkiran.⁶⁸

C. Standar dan Tujuan Manajemen Sarana Dan Prasarana

Untuk menjamin terwujudnya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah

⁶⁸ Bafadal, *Op.Cit.*, 56-57.

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).⁶⁹

Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. Kriteria maksimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.⁷⁰

Sedangkan tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk memberikan layanan secara professional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal ini, Bafadal menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:⁷¹

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
3. Untuk mengupayakan supaya keberadaan sarana dan prasana selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua pihak sekolah.⁷²

⁶⁹ Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasaran/a Sekolah

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Bafadal, *Op.Cit.*, 58.

⁷² Barnawi dan Arifin, *Op.Cit.*, 36.

